

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Aminuddin¹, Akhyar Abdullah², Clara Nella³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Correspondent author: aminuddin@uho.ac.id

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the application of management information systems in state financial management and financial management at the Regional Office of the Directorate General of Treasury of Southeast Sulawesi Province. This research uses qualitative methods with descriptive research types. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the integrated system in the SAKTI application has an impact on saving time for the financial management process. The SAKTI application also has a high level of security because it uses One Time Password (OTP). Although the SAKTI application is still classified as a new application, its application is very effective and optimal and facilitates the financial management process. Financial management at the Regional Office of the Directorate General of Treasury of Southeast Sulawesi Province is very efficient and the SAKTI application is used for all management processes ranging from planning, recording to accountability.

Keywords: Financial Management; Management Information Systems; State Finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi dalam aplikasi SAKTI berdampak pada penghematan waktu untuk proses pengelolaan keuangan. Aplikasi SAKTI juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena menggunakan One Time Password (OTP). Meskipun aplikasi SAKTI masih tergolong aplikasi yang baru tetapi dalam penerapannya sangat efektif dan optimal serta mempermudah proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat efisien dan aplikasi SAKTI digunakan untuk semua proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pencatatan hingga pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Keuangan Negara; Manajemen Keuangan; Sistem Informasi Manajemen

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Perubahan yang cepat dalam bidang teknologi dan pemrosesan informasi telah mengubah cara organisasi dikelola di masa depan. Pengembangan sistem informasi manajemen merupakan kebutuhan bagi para pemimpin karena semakin pentingnya informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya, teknologi

informasi adalah peluang untuk sistem manajemen kontemporer. Mekanisme di mana teknologi informasi digunakan untuk tugas kepemimpinan/manajer seperti pelaporan atau pengumpulan data. Dan teknologi informasi saat ini memungkinkan untuk menyediakan database yang lebih kompleks sehingga sistem akuntansi manajemen dapat menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan.

Kekuasaan pengelolaan negara dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut, meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Namun dalam mengelola keuangan negara, Presiden dibantu oleh sejumlah pihak, mulai dari Menteri Keuangan, Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, serta Kepala Daerah. Menurut pasal 6 UU No 17 Tahun 2003, sebagian dari kekuasaan tersebut adalah dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau Lembaga yang dipimpinya, diserahkan kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang.

Sementara dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas yaitu menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu Eselon I dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Pada umumnya tugas pokok dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, analisis kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban dibidang perbendaharaan sesuai dengan aturan konstitusi.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan negara merupakan unsur yang sangat penting sebagai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pada era globalisasi ini semakin meningkat kesadaran akan adanya suatu laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah sangat berguna bagi semua kalangan, baik kalangan internal maupun eksternal. Penyusun laporan keuangan ini perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan seperti satuan kerja dan Bendahara Umum Negara. Satuan kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Kualitas Laporan keuangan tersebut agar dapat terpenuhi, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah salah satu pengendalian internal dalam sistem akuntansi pemerintah dan salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan terus mengembangkan teknologi informasi yang disediakan guna meningkatkan kualitas dan mempermudah proses pengelolaan fiskal nasional. Dalam mengelola keuangan negara Satuan Kerja (Satker) menggunakan setidaknya ada sembilan aplikasi yang digunakan, antara lain Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Persediaan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga dan Daftar Isian Pengguna Anggaran (RKA K/L-DIPA), Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Rekonsiliasi Mandiri (e-Rekon), Personal Identification Number Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Pin PPSPM), dan Perencanaan Kas (Renkas) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan solusi komprehensif pengelolaan keuangan negara di tingkat unit kerja, sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat. Surya dan Supriyatna (2013:1) menyatakan bahwa setiap bentuk organisasi yang menggunakan teknologi informasi pada akhirnya akan menghadapi berbagai risiko atau gangguan Teknologi Informasi (TI) yang semakin kompleks dan variatif di era sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Anggaran

mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yaitu peningkatan kecepatan teknologi tidak dibarengi dengan kecepatan pemahaman penggunaannya.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, menjadi penting penerapan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan, sehingga urgen pula untuk menulis tentang "Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dengan analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh gambaran secara luas yang deskriptif, eksplanatif dan mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2009:29) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih berfokus pada proses dan makna suatu masalah. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan tentang realitas dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau keterkaitan dengan variabel lain. Lokasi penelitian berada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertempat di Jalan Mayjeln Sutoyo No. 34, Kendari Sulawesi Tenggara. 93122.

Informan penelitian adalah warga masyarakat yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti turun secara langsung ke lapangan kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, yakni salah satunya mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari, membawahi empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sebagai berikut:

1. KPPN Kendari (060) Tipe A1
2. KPPN Baubau (153) Tipe A2
3. KPPN Kolaka (156) Tipe A2
4. KPPN Raha (157) Tipe A2

Dari analisis hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas terkait dengan teori yang digunakan yaitu Sistem Informasi Manajemen menurut Susanto (2013:58) yaitu: Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Database, Prosedur, Manusia, dan Pengelolaan Keuangan menurut Kuswadi (2005:3) yaitu: Perencanaan, Pencatatan, dan Pelaporan yang akan menghasilkan sistem informasi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Agar lebih jelasnya penulis akan menguraikan masing-masing indikator, yakni sebagai berikut:

A. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas dan mempermudah proses pengelolaan fiskal nasional.

Sistem informasi manajemen adalah sistem yang membantu manajemen dalam pengumpulan, pemrosesan dan analisis data, evaluasi data dan penyediaan informasi yang berharga dan pada akhirnya pengambilan keputusan yang membantu mendukung fungsi operasional manajemen.

Dalam konsep sistem informasi manajemen, yang harus diintegrasikan adalah semua elemen dan sub elemen yang terlibat dalam pembentukan sistem informasi manajemen mutu. Unsur-unsur ini, juga dikenal sebagai komponen sistem informasi akuntansi, meliputi:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Dalam menjalankan sebuah sistem informasi manajemen diperlukan peralatan yang menunjang sehingga sistem informasi manajemen dapat terlaksana. Dengan adanya perangkat keras membantu dalam pemrosesan informasi. Menurut Susanto (2013:58) Perangkat keras (*hardware*) merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Perangkat keras (*hardware*) merupakan komponen komputer yang bentuknya bisa dilihat dan dipegang manusia secara nyata seperti komputer, printer, handphone dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dan observasi dapat disimpulkan bahwa penerapan perangkat keras dalam menunjang keberhasilan Sistem Informasi Manajemen pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah tersedia dan terpenuhi serta telah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan hal ini juga sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Susanto (2013:58) bahwa perangkat keras adalah peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Adapun beberapa perangkat keras yang digunakan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: Personal komputer/laptop sebanyak 43 unit, Printer sebanyak 22 unit, UPS sebanyak 8 unit, dan Mesin Fotocopy sebanyak 2 unit. Seperti halnya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, penggunaan perangkat keras sangat membantu dalam proses pengolahan data keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan perangkat keras pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak (*software*) merupakan kumpulan dari program- program yang digunakan untuk menjalankan komputer. Demi meningkatkan kualitas serta mempermudah proses pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara terus menerus mengembangkan layanan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghadirkan aplikasi (*software*) yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dimana Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan perangkat lunak yang berbentuk website yang membantu proses pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabel.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merangkai berbagai aplikasi di tingkat satuan kerja yang selama ini berdiri sendiri menjadi modul-modul yang terintegrasi dalam satu sistem. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat

Instansi (SAKTI) juga dirancang untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual serta terhubung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) melalui portal SPAN. Dalam aplikasi SAKTI terdapat 9 modul yaitu modul Administrator, modul Penganggaran, modul Persediaan, modul GL dan Pelaporan, modul Komitmen, modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Pembayaran, dan modul Piutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara dimana Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan perangkat lunak yang berbentuk website yang membantu proses pengelolaan keuangan negara agar lebih mudah, aman, nyaman, handal, transparansi dan akuntabel. Dan interkoneksi antara SAKTI dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan diiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN.

Dalam aplikasi SAKTI terdapat fitur *Access Control List (ACL)*. *Access Control List (ACL)* adalah pengelompokan paket menu berdasarkan kategori sehingga Administrator dapat menentukan menu transaksi ataupun izin akses menu transaksi tersebut. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Kebenaran transaksi yang direkam akan dicek melalui mekanisme check and balance oleh beberapa pihak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

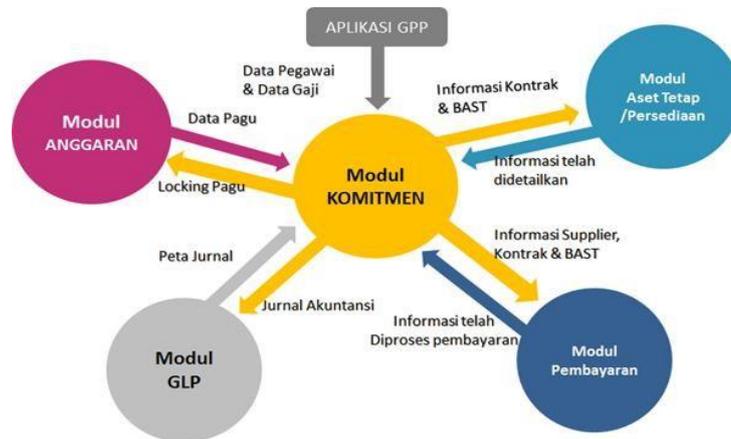
Gambar 1. Tampilan beranda (depan) Aplikasi SAKTI



Sumber: data diolah dari aplikasi, 2023

Adapun beberapa modul yang ada pada SAKTI adalah: 1) Modul Administrator; 2) Modul Penganggaran; 3) Modul Persediaan; 4) Modul Komitmen; 5) Modul Pembayaran; 6) Modul Bendahara; 7) Modul Aset Tetap; 8) Modul Piutang; 9) Modul GL dan Pelaporan (GLP)

Gambar 2. Hubungan modul Komitmen dengan Modul Lain

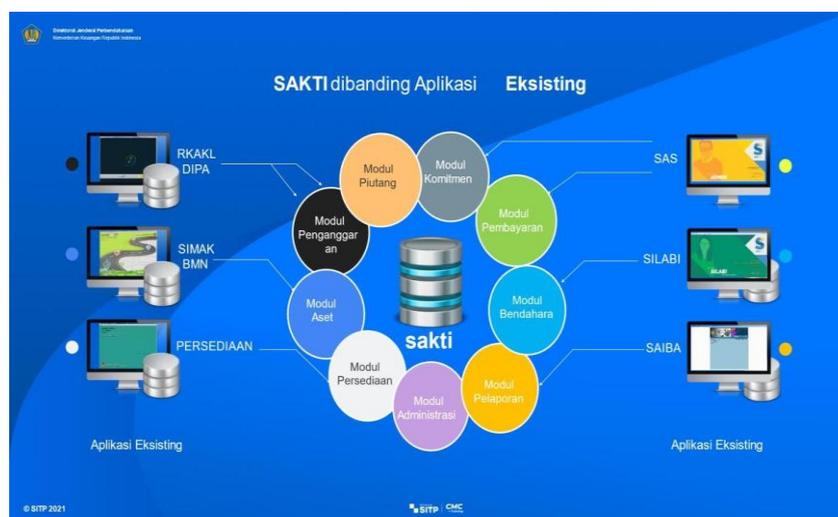


Petunjuk teknis ini ditujukan untuk memandu operator aplikasi SAKTI dalam penatausahaan (pengesahan dan pelaporan) transaksi Hibah Langsung Barang Jasa Surat Berharga pada Satker Non BLU. Untuk Satker BLU, transaksi Hibah Langsung Barang hanya dicatat pada Modul Aset Tetap dengan menggunakan menu Hibah Masuk (tanpa mekanisme pengesahan MPHBJ).)

Level pengguna dalam modul GL dan Pelaporan

- 1) Operator: User yang memiliki kewenangan melakukan RUH jurnal penyesuaian/koreksi dan realisasi kinerja, melakukan proses validasi jurnal, melakukan proses posting, melakukan proses tutup periode, melakukan pencetakan laporan keuangan, melakukan proses pengiriman ADK konsolidasi dan melakukan proses konfirmasi
 - 2) KPA: user yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengiriman ADK rekonsolidasi.
- Adapun output dari modul GL dan Pelaporan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran

Gambar 3. Aplikasi SAKTI dan Aplikasi Eksisting



sumber: Pengolahan data aplikasi SAKTI, 2023

Adapun perbedaan SAKTI dengan Aplikasi Satker sebelumnya yaitu menggunakan satu database terpusat, memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan adanya proses enkripsi/dekripsi Arsip Data Komputer (ADK), dapat di-install di beberapa operating system (seperti Windows, Linux), lebih mudah digunakan (user friendly), dapat dijalankan dalam spesifikasi PC/Laptop yang minimum, serta kinerja aplikasi yang lebih konsisten.

Untuk meningkatkan keamanan data, setiap data yang dihasilkan dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) akan ditandatangani secara digital menggunakan Pin oleh Pejabat yang berwenang. Untuk membuka data tersebut diperlukan kode encrypt yang dibuat dengan sistem hashed yang terdapat dalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

- 3. Basis Data (Database):** merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Basis data (database) adalah metode yang digunakan untuk menyimpan aplikasi besar yang digunakan bersama, dengan banyak pengguna yang membutuhkan koordinasi di antara banyak pengguna. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan catatan atau data terstruktur di komputer sehingga program dapat mengakses data untuk menjawab pertanyaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi dapat disimpulkan bahwa seluruh database modul-modul yang ada di dalam SAKTI terintegrasi. Integrasi database ini memungkinkan untuk mengakses data melalui seluruh modul yang berhubungan. Dengan demikian database yang terdapat pada aplikasi SAKTI dapat digunakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban hal ini sudah sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Susanto (2013) bahwa database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan dalam media penyimpanan di suatu perusahaan yang dapat mempermudah pekerjaan. Pada dimensi ini sudah sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Edi Yanto dan Akfir tahun (2019) hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa dengan adanya database ini kualitas informasi yang dihasilkan lebih relevan, akurat yang memberi kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi keuangan di Dinas Lingkungan Hidup.

Pada aplikasi SAKTI menerapkan konsep single database yang mengintegrasikan aplikasi satuan kerja yang ada. Dengan sistem integrasi, sekali input data dapat digunakan oleh seluruh modul SAKTI, sehingga tidak perlu dilakukan input database berkali-kali.

4. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan sistem informasi manajemen keuangan yang dikehendaki.

Prosedur merupakan komponen fisik yang terdapat dalam bentuk beberapa program indikator prosedur, yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang akurat. Pengolahan data adalah pengolahan data menjadi bentuk yang lebih informatif atau beberapa informasi. Informasi

dikatakan akurat jika memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan memiliki nilai yang nyata, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan dan dilaksanakan sudah terstruktur dan sistematis sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan sehingga sudah tidak ada kendala seperti dalam proses pengumpulan data dikarenakan dalam proses nya telah menggunakan aplikasi SAKTI. Di dalam SAKTI semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan dikunci sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini untuk menjamin validitas dari tiap-tiap transaksi yang ada.

5. Manusia (Brainware)

Manusia (brainware) adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan, pemrosesan, dari penggunaan sistem informasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan komputer adalah sesuatu yang penting dalam penggunaan sistem informasi. Menurut Susanto (2013:58) Manusia (*brainware*) merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan dalam data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan sistem informasi tertentu.

Kemampuan sumber daya manusia pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sangat baik dapat dilihat dari laporan kinerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara 2022 bahwa nilai rata-rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 91,25% dari target 78%. Dalam hal penggunaan Sistem Informasi Manajemen, dapat dikatakan sudah sangat efektif dilihat dari kompetensi dan kapasitas para pegawai yang telah memenuhi standar profesionalitas.

Pada SAKTI terdapat beberapa level user yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda disesuaikan dengan kewenangan dan jabatan user. Level maker digunakan oleh operator untuk merekam data transaksi. Hasil dari perekaman masih dapat diubah atau pun dihapus. Transaksi yang direkam oleh operator tidak tampil dalam laporan sebelum dilakukan validasi oleh user *checker*. Level Checker bertugas untuk melakukan validasi dengan output yang tidak dapat diubah dan dihapus, tetapi tidak tampil dalam laporan, siap untuk disetujui atau dibatalkan dan level ini dilakukan oleh validator. Level Approver bertugas melakukan approve dengan hasil yang tidak dapat diubah dan dihapus, tampil dalam laporan, terbentuk jurnal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, observasi dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Kemampuan sumber daya manusia pada kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengoperasikan komputer,

menganalisis serta mengolah data sudah sangat efektif, hal ini sudah sesuai dengan yang dikemukakan Susanto (2013:58) Manusia (brainware) merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan dalam data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan sistem informasi tertentu, hal ini juga telah dipertegaskan oleh informan.

Seluruh karyawan wajib memahami, menguasai dan mengoperasikan sistem dengan benar sebagai pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Keuangan melakukan pembinaan secara langsung dan rutin kepada pegawai melalui Pusdiklat Perbendaharaan Anggaran melalui *Training Of Trainer (TOT)*.

B. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengendalian dana dan aset. Tiga kerangka dasar pengelolaan, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan Keuangan adalah kegiatan menentukan tujuan dari organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Merencanakan kegiatan keuangan, Persalah satunya adalah menetapkan tujuan keuangan dan anggaran keuangan tahunan dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi dapat disimpulkan bahwa Sistem Perencanaan Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara itu bersifat Bottom Up atau dari bawah ke atas yang artinya perencanaan terlebih dahulu dilakukan oleh masing-masing Satker dari Kantor Vertikal kemudian Pusat dan Pusat yang akan melakukan konsolidasi apakah penyusunan anggaran tersebut bisa berlanjut atau tidak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuswadi (2005) kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Proses perencanaan keuangan itu dilakukan pada tahun sebelum tahun periode.

Dalam proses perencanaan yang dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menggunakan aplikasi SAKTI, hal ini sudah sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atik Rusmayanti tahun (2014) hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan menjadi lebih terbantu dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data.

2. Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan mencatat setiap transaksi keuangan yang telah terjadi dan dicatat secara sistematis dan secara kronologis. Pencatatan digunakan sebagai penanda transaksi yang terjadi dalam periode tersebut. Proses pencatatan dalam pengelolaan keuangan

negara pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dan observasi dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan dalam proses pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menggunakan sistem aplikasi manajemen yaitu SAKTI dimana metode pencatatannya menggunakan metode perpetual dimana metode perpetual adalah metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pada setiap transaksi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kuswadi (2005:3) bahwa pencatatan adalah kegiatan mencatat setiap transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara sistematis dan kronologis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam organisasi. Penyusunan pencatatan keuangan diawali dari tahap pengumpulan dokumen yang berpengaruh secara langsung dengan kejadian transaksi. Aplikasi SAKTI menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sesuai dengan amanat Undang-Undang. Jurnal yang dihasilkan terbentuk di tiap-tiap transaksi. Setiap informasi pada pencatatan didasarkan pada dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan.

3. Pelaporan

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Fahmi (2012) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi lapangan keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, observasi dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sangat efektif serta telah menggunakan aplikasi SAKTI yang akan mempermudah dalam proses pertanggungjawaban keuangan.

Laporan keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan tingkat satuan kerja/UAKPA di lingkup UAPPA-W Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara seperti kantor wilayah dan satuan kerja yang bertanggungjawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.

Laporan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada laporan tiap bulan, triwulan, semester dan tutup buku yang dilakukan setiap akhir tahun seperti yang dikemukakan oleh Raharjapura (2011) bahwa laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu. Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 2 laporan, laporan pertanggungjawaban sebagai wilayah (kompilasi seluruh satker KPPN) dan laporan pertanggungjawaban kanwil sendiri yang nantinya akan digabungkan di laporan wilayah.

Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

Laporan Realisasi Anggaran;

menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 189.857.095 atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.331.775.247 atau mencapai 99,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp 10.409.595.000

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada TA 2022 adalah sebesar Rp 189.857.095. atau mencapai 100% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian estimasi pendapatan dan realisasi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022

URAIAN	TA 2022		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	189.857.095	100
Jumlah Pendapatan	-	189.857.095	100

Sumber: Laporan Keuangan UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022

Realisasi PNBP per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp42.204.892 atau 28,58% dibandingkan periode per 31 Desember 2021.

Belanja; Realisasi belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp10.331.775.274 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp10.409.595.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	TA 2022		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	1.440.813.000	1.430.720.000	99,29%
Belanja Barang	7.721.604.000	7.664.449.274	99,25%
Belanja Modal	1.247.178.000	1.236.606.000	99,15%
Total Belanja	10.409.595.000	10.331.775.274	99,25%

Sumber: Laporan Keuangan UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022

Realisasi belanja mengalami penurunan sebesar (Rp1.059.716.616) atau sebesar (9,30%). Penurunan terutama disebabkan berkurangnya pagu/nilai kontrak/SPK dan pembayaran termin pada belanja modal.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Naik/Turun	%
Belanja Pegawai	1.430.720.000	1.413.135.000	17.585.000	1,24
Belanja Barang	7.664.449.274	7.293.497.271	370.952.003	5,08
Belanja Modal	1.236.606.000	2.684.859.619	(1.448.253.619)	(53,94)
Jumlah	10.331.775.274	11.391.491.890	(1.059.716.616)	(9,30)

Sumber: Laporan Keuangan UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022

Neraca; Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 123.156.495.721 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 305.389.887; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 123.156.495.721; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 4.330.230. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing- masing sebesar Rp 162.294.250 dan Rp 123.303.921.588.

Laporan Operasional; Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan- LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 43.456.668, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 12.149.398.225, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 12.105.941.587). Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 163.503.095 dan nilai Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar (Rp 11.942.438.492).

Laporan Perubahan Ekuitas; Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp 124.450.200.197 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 11.942.438.492) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 439.442.309 dan Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp 10.356.717.574 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 123.303.921.588.

Catatan Atas Laporan Keuangan; Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penerapan sistem informasi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara maka penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SAKTI) dalam pengelolaan keuangan negara di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat efektif, menyeluruh, dan transparan, memudahkan proses keuangan serta menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Agustiani, H. 2006. Psikologi perkembangan: Pendekatan ekologi kaitannya dengan konsep diri. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anwar, M. 2019. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Kencana.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 1986. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bastian, Indra. 2009. Akutansi untuk LSM dan Partai Politik. Jakarta: Erlangga. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Charter, Martin dan U Tischner. (Eds) (2017). Sustainable solutions: developing products and services for the future. Routledge.
- Davis, Gordon B. 2002. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, PPM. Jakarta.
- Dawson, Catherine. 2010. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, Surya. 2013. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doyle, M. 2011. Beginning PHP 5.3. John Wiley & Sons.
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Fatta, Hanif Al. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi

- Given, Lisa M. (editor). 2008. The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks: Sage.
- Hall, James. 2009. Sistem Informasi Akuntansi, (Terjemahan Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary). Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi II. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
- Hasibuan. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hutahaean, Jeperson. 2015. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: IAI.
- Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. Pengantar Manajemen Keuangan. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Diandra Kreatif.
- Jogiyanto. 2001. Analisis & Desain Sistem Informasi : pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset. Keown, Arthur dan John D. Martin dan J. William Petty dan David F. Scott, JR.
2005. Financial Management Principles and Applications. New Jersey.
- Kuswadi. 2005. Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mangukunegara, A.A.P. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Marshall, B. Romney dan P. J Steinbart. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- McLeod, Jr. Raymond dan George P. Schell. 2011. Sistem Informasi Manajemen (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, Putu Agus Eka. 2014. Sistem Informasi dan Implementasinya. Bandung: Informatika Bandung.
- Raharjaputra, H. S. 2011. Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy, A. Judge. 2011. Perilaku organisasi. Salemba Empat. Jakarta
- Sidharta, Lani. 1995. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen konsep dan pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.

Susanto, Azhar. 2013. Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian- Resiko-Pengembangan, Edisi Perdana. Bandung: Lingga Jaya.

Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen, Andi. Yogyakarta. Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutrisno. 2003. Manajemen Keuangan. Teori konsep dan aplikasi, Edisi pertama EKONISIA. Yogyakarta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.

W. Riawan Tjandra. 2009. Hukum Keuangan Negara. Jakarta. Grasindo

Weston, J. Fred dan Thomas E Copeland. 1992. Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan, Jakarta: Binarupa Aksara.

Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wijaya, David. 2017. Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya. Jakarta: PT. Grasindo.

Journal

Akfir, E. Y. (2019). "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen".

Indonesian Journal Of Strategic Management, 4-5.

Dzakiyani, W. H. (n.d.). (2020). "Analisis Sistem Akuntansi atas Rekonsiliasi Eksternal pada KPPN Jakarta VII". 1-2.

Machmud, Rizan. (2013). Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Permasalahan Narkotika (LAPASTIKA) Bollangi Kabupaten Gowa. Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar. Vol 9 Nomor 3.

Ningrum, Pratiwi Nindya. (2013). "Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terkait Pengendalian Internal Pada STIE Widya Gama Lumajang". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol 2 Nomor 2.

Pumomo. Eko Sigit, dan Samopa. Febriliyan. (2013). "Pembuatan Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan Negara Menggunakan PHP dan MySL". Jurnal Teknik Pomits. Vol 2 Nomor 2.

Sidh, R. (2013). "Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen".

Jurnal Computech & Bisnis. Vol 7 Nomor 1.

Sudjiman, P. E. (2018). "Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan". Jurnal Teika. Vol 8 Nomor 2.

Sumbu, T. (2010). "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah". Jurnal Hukum, 6-10.

Utama, M. R. (2022). Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Aplikasi Administrasi, 4.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Kementerian Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku Chief Information Officer Kementerian Keuangan Nomor 06/SA.8/2017 Tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Keuangan UAPPA-W Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022

Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Internet

<https://www.inews.id/finance/makro/mengetahui-mekanisme-pengelolaan-keuangan-negara> (Diakses pada tanggal 4 November pukul 11:45 AM)

<https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/> (Diakses pada tanggal 10 Maret pukul 10:15 AM)